

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Akhyar Ari Gayo dan Arfan Faiz Muhlizi (ed.), 2016, *Penanggulangan Terorisme dalam Perspektif Hukum, Sosial, dan Ekonomi*, Jakarta, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan PT Dian Rakyat.
- Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Andi Sofyan, 2017, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Jakarta, Prenada Media.
- Angel Damayanti, dkk., 2013, *Perkembangan Terorisme di Indonesia*, Jakarta, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
- Burhan Bungin, 2013, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [Herziene Inlandsche Reglement]*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Didik Endro Purwoleksono, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Surabaya, Airlangga University Press.
- Dina Susiani, 2019, *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*, Jember, Pustaka Abadi.
- Djoko Prakoso, 2008, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum: Legal Research*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ecep Nurjamal, 2023, *Buku Ajar Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Acara Pidana: Dilengkapi UU KUHP baru*, Tasikmalaya, Edu Publisher.
- Eddy O. S. Hiarieej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga.
- Ediwarman, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Elidar Sari, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Lhokseumawe, BieNA Edukasi.

- Flora Dianti, 2023, *Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia: Perbandingan HIR dan KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju.
- Institute of Economic and Peace, 2022, *Global Terrorism Index 2022: Measuring the Impact of Terrorism*, Sydney, IEP.
- Isharyanto, 2020, *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*, Jakarta, Penerbit WR.
- John Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, 2022, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- M. Syamsuddin, 2017, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- M. D. Shodiq, 2018, *Paradigma Deradikalisasi dalam Perspektif Hukum*, Jakarta, Pustaka Harakatuna.
- Mahkamah Agung, 2007, *Naskah Akademis Undang-Undang Terorisme*, Jakarta, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.
- Manotar Tampubolon, Nelson Simanjuntak, dan Fernando Silalahi, 2023, *Hukum dan Teori Konstitusi*, Jakarta, PT Global Eksekutif Teknologi.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 2000.
- Mohammad Hasan Ansori, dkk., 2019, *Memberantas Terorisme di Indonesia: Praktik, Kebijakan, dan Tantangan*, Jakarta, The Habibie Center.
- Muchsin, 2010, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Surabaya, Untag Press.
- Muhammad Hatta, 2019, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, Lhokseumawe, Unimal Press.

- Muhammad Sawir, 2021, *Ilmu Administrasi dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual dan Praktik*, Yogyakarta, Deepublish.
- Nikolas Simanjuntak, 2009, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Ratna Nurul Afiah, 1989, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki, 2020, *Teori Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2007, *Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme bagi Penyedia Jasa Keuangan (Pedoman V)*, Jakarta, PPATK Intrac.
- R. O. Siahaan, 2009, *Hukum Acara Pidana*, Cibubur, Rao Press.
- R. Soesilo, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- R. Subekti, 2007, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Rahman Amin, 2020, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*, Yogyakarta, Deepublish.
- Rianto Adi, 2021, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Romy Bobby Manumpahi, "Pengembalian Barang Bukti dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP," *Lex Crimen* 10 (April 2021).
- Suhardi Alius, 2019, *Pemahaman Membawa Bencana: Bunga Rampai Penanggulangan Terorisme*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Sulistyowati, 2020, *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, Yogyakarta, Deepublish.
- Syarifurohmat Pratama Santoso, 2020, *Pengantar Dasar Kajian Terorisme Abad 21: Menjaga Stabilitas Keamanan Negara*, Yogyakarta, Deepublish.
- Tim NRA TPPT Indonesia, 2019, *Dokumen Pengkinian Penilaian Risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Tahun 2015*, Jakarta, PPATK.

Umar Sholahudin, 2020, *Hukum dan Keadilan Masyarakat*, Malang, Setara Press.

B. Karya Ilmiah

Adhitya Yuda Prasetya, Athor Subroto, dan Amanah Nurish, "Model Pendanaan Terorisme Melalui Media Cryptocurrency," *Journal of Terrorism Studies* 3 (Mei 2021).

Ardken Fisabillah, Pujiyono, dan Umi Rozah, "Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sebagai Transnational Organized Crime dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia," *Diponegoro Law Journal* 8 (Oktober 2019).

Bastianto Nugroho, "Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP," *Yuridika* 32 (Januari 2017).

Biyanto, "Mengurai Benang Kusut Terorisme (Memahami Penyebab, Karakter, dan Solusi)," *Al-Buhuts* 9 (2013).

Febriyanti Silaen dan Syawal Amry Siregar, Hubungan Kebijakan Kriminal dengan Kebijakan Hukum Pidana, *Jurnal Darma Agung* 28 (April 2020).

Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan," *Warta Dharmawangsa* 13 (Januari 2019).

Ika Veni Anisa dan Muhamad Syauqillah, "Strategi Kontra Intelijen dalam Menghadapi Transformasi Pendanaan Terorisme Jamaah Islamiyah," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7 (November 2022).

Johan Yasin, "Hak Azasi Manusia dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara dalam Hukum Positif Indonesia," *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 11 (Desember 2009).

Mishella Elisabeth Pangemanan, Dientje Rumimpunu, dan Sarah D. L. Roeroe, "Pembuktian Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme," *Lex Crimen* 10 (September 2021).

Nada Biyan Naritha dan Alvi Leo Saputra, "Pemidanaan Penyandang Dana Pelaku Terorisme," *JHP (Jurnal Hasil Penelitian)* 6 (Juli 2021).

Randy Pradityo, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5 (April 2016).

Rizal Firmansyah dan Wiend Sakti Myharto, “Penegakan Hukum terhadap Kriminologi Pendanaan Terorisme dalam Perspektif Hukum Nasional (Studi Kasus Putusan No. 7/Pid. Sus/2021/PN. Jkt. Tim),” *Jurnal Ilmiah Publika* 10 (Juli-Desember 2022).

Ukkap Marolop Aruan, “Tata Cara Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Menurut KUHAP,” *Lex Crimen* 3 (April 2014).

Yurina Ningsi Eato, “Keabsahan Alat Bukti dan Barang Bukti pada Perkara Pidana,” *Lex Crimen* 6 (April 2017).

C. Peraturan Perundangan-undangan

Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU Nomor 8 Tahun 1981, LN No. 76, TLN No. 3209.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengesahan International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999)*, UU Nomor 6 Tahun 2006, LN No. 29, TLN No. 4617.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU Nomor 48 Tahun 2009, LN No. 157, TLN No. 5076.

Indonesia, *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*, UU Nomor 9 Tahun 2013, LN No. 50, TLN No. 5406.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang*, UU Nomor 16 Tahun 2017, LN No. 239, TLN No. 6139.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang*, UU Nomor 5 Tahun 2018, LN No. 92, TLN No. 6216.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, PP Nomor 27 Tahun 1983, LN No. 36, TLN No. 3258.

Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan oleh Organisasi Kemasyarakatan dalam*

Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Perpres Nomor 18 Tahun 2017, LN No. 31.

Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*, Perpres Nomor 13 Tahun 2018, LN No. 23.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Perkap Nomor 10 Tahun 2009.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 981/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim.

D. Internet

Andita Rahma, “Penangkapan Terduga Teroris di Lampung, Densus 88 Sita 400 Kotak Amal,” <https://nasional.tempo.co/>, diakses 30 Agustus 2023.

Moh Khoeron, “Diduga Himpun Dana Teroris di Lampung, Kemenag: Izin LAZ ABA Sudah Dicabut Sejak Januari 2021,” <https://www.kemenag.go.id/>, diakses 30 Agustus 2023.

Mutia Fauzia, “PPATK: Penggalangan Dana Terorisme Lewat Kotak Amal Sulit Dilacak,” <https://nasional.kompas.com/>, diakses 29 Agustus 2023.

Rio Rizky Pangestu, “Ke Mana Duit yang Disita Densus 88 dari Ratusan Kotak Amal? Waketum MUI Beri Peringatan,” <https://www.pikiran-rakyat.com/>, diakses 25 Agustus 2023.